



**RAPBD 2013 FOKUS PELAYANAN DASAR**

## Dominan, Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

**YOGYA (KR)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan porsi yang dominan terhadap urusan pendidikan dan kesehatan pada 2013 mendatang. Hal ini terlihat dari porsi anggaran di kedua urusan tersebut yang lebih tinggi dari kegiatan lain.

Dalam penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 oleh Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Senin (3/12), urusan pendidikan dianggarkan Rp 119,6 miliar. Sementara urusan kesehatan sebanyak Rp 109,4 miliar. "Kedua urusan tersebut kami berikan porsi yang lebih tinggi karena sama-

ngat anggaran tahun depan ialah pelayanan dasar," ungkap Haryadi usai memaparkan nota keuangan RAPBD 2013 dalam sidang paripurna di gedung dewan kemarin.

Haryadi menambahkan, tingginya alokasi anggaran pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan akses pendidikan melalui program penjaminan serta bantuan dana

operasional sekolah. Bantuan tersebut diberikan menyeluruh baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Sehingga diwacanakan, dana investasi sekolah atau uang gedung yang selama ini dibebankan kepada orang tua, ke depan akan ditanggung oleh pemerintah. Demikian pula dalam urusan kesehatan, prioritas anggaran fokus pada pemberian jaminan kesehatan. Warga yang ber-KTP Kota Yogyakarta pun nantinya dapat menikmati layanan kesehatan secara cuma-cuma.

Namun demikian, Haryadi belum akan memberkan se-

cara teknis berbagai pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan tersebut. "Detailnya masih menunggu pembahasan teknis anggaran bersama komisi di dewan. Yang jelas, akses untuk pendidikan dan kesehatan, akan semakin mudah," terangnya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Henry Kuncoroyekti mengaku, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memang diberikan porsi yang lebih. Hal ini lantaran serapan anggaran di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selama ini cukup rendah. Se-

hingga perlu dialihkan dalam program yang mudah terserap dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. "Yang jelas nanti periksa ke puskesmas gratis dan sekolah hingga SMA juga bisa gratis," katanya.

Kendati anggaran pendidikan dan kesehatan cukup tinggi, namun Henry memastikan tidak akan mengganggu kegiatan lain. Terutama pada urusan pekerjaan umum atau pembangunan infrastruktur di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) yang selama ini membutuhkan anggaran cukup besar. (R-9)-a

Instansi <b>DPDPK</b>		Tindak Lanjut <input type="checkbox"/> Untuk Dilengkapi <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
--------------------------	--	---

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005